

Identifikasi Faktor-Faktor yang Menentukan Kemiskinan Secara Sosial di Kota Bandung

Identification of Social Determining Factors in the City of Bandung

¹Wati Sri Devi, ²Ima Amaliah, ³Westi Riany

123 Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung Jalan Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email : Impii.16devi@gmail.com, 2amalia.razi@gmail.com, 3westiriani@yahoo.com

Abstract. Poverty is a multidimensional problem related to economic, social and political aspects. Social poverty is a condition of the social and economic inability of the poor to fulfill basic living needs related to clothing, food, shelter, health, and education. The city of Bandung is the second largest city in the province of West Java with 103,980 people in 2017. Poverty is not only seen as an economic problem but related to social, because poverty has an impact on dependency, alienation, vulnerability and helplessness. This study uses quantitative descriptive research methods. Samples taken were 270 respondents from the poor population of Bandung City with the technique of determining samples using Issac and Michael tables. The measurement used is a Likert scale and the data from the respondents on the five variable instruments from the factors that determine poverty socially compiled into 38 statement items, then the data obtained from the survey results are processed using SPSS version 23 and analyzed and displayed using descriptive statistics. Based on the results of the scoring, it is known that the variables of proper, powerlessness, vulnerability, dependence, and isolation are factors that determine social poverty in the city of Bandung. Of the five variables there are dominant variables in determining social poverty, namely the dependent variable.

Keywords: Poverty, Dependence, Social Poverty.

Abstrak. Kemiskinan merupakan persoalan yang multidimensional terkait dengan aspek ekonomi, sosial, dan politik. Kemiskinan sosial adalah kondisi ketidakmampuan kelompok miskin secara sosial maupun ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar terkait dengan sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Kota Bandung merupakan kota yang memiliki penduduk miskin terbesar kedua di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 103.980 jiwa pada tahun 2017. Kemiskinan tersebut tidak hanya dipandang sebagai masalah ekonomi saja namun terkait dengan sosial, karena kemiskinan menimbulkan dampak ketergantungan, keterasingan, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Sampel yang diambil sebanyak 270 responden penduduk miskin Kota Bandung dengan teknik penentuan sampel menggunakan tabel Issac dan Michael. Pengukuran yang digunakan adalah skala Likert dan data dari responden terhadap lima instrumen variabel dari faktor-faktor yang menentukan kemiskinan secara sosial disusun menjadi 38 item pernyataan, kemudian data yang didapatkan dari hasil survey diolah menggunakan SPSS versi 23 dan dianalisis serta ditampilkan menggunakan descriptive statistics. Berdasarkan hasil scoring, diketahui bahwa variabel kemiskinan, ketidakberdayaan, kerentanan, ketergantungan, dan keterasingan merupakan faktor-faktor yang menentukam kemiskinan secara sosial di Kota Bandung. Dari kelima variabel tersebut terdapat variabel yang dominan dalam menentukan kemiskinan secara sosial, yaitu variabel ketergantungan.

Kata Kunci : Kemiskinan, Ketergantungan, Kemiskinan Sosial.

A. Pendahuluan

Secara umum, kemiskinan menggambarkan kondisi ketidakmampuan pendapatan seseorang dalam mencukupi kebutuhan pokok, sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004). Sementara Chambers menggambarkan kemiskinan dengan lima karakteristik yaitu, kemiskinan material, kelemahan fisik, keterkucilan dan keterpencilan, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Ada banyak faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya terjadi karena faktor-faktor ekonomi, namun juga faktor sosial dan politik. Problema kemiskinan saat ini berada pada dimensi yang melebihi angka-angka ekonomi. Hal tersebut menyangkut kelemahan, kerentanan, dan ketidakberdayaan (kemiskinan) yang

berhubungan dengan sistem dan pranata sosial. Menurut Aspiranti dan Ima Amaliah (2016), kemiskinan tidak hanya menggunakan cara pandang ekonomi namun juga dilihat dari aspek sosial. Proses pembangunan selama ini, melahirkan fenomena kemiskinan dengan ciri keterbelakangan, keterpencilan, ketidakberdayaan, dan ketersisihan. Dilihat dari aspek sosial, indikator kemiskinan secara sosial dilihat dari keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, dan kerentanan menjadi miskin.

Pada tahun 2016, Kota Bandung memiliki penduduk miskin sebanyak 107.580 jiwa, namun pada tahun 2017 menurun hingga 103.980 jiwa disertai dengan peningkatan angka garis kemiskinan sebesar 420.579 rupiah/bulan. Angka garis kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan penduduk Kota Bandung masih tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan per bulan, meski mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Jika menggunakan asumsi perhitungan menurut *World Bank* yaitu, 2 dollar dikalikan dengan jumlah hari dalam sebulan (Rp.28.000x30) maka rata-rata pendapatan seharusnya sebesar Rp.840.000 per bulan, sedangkan rata-rata pendapatan per bulan di Kota Bandung sebesar Rp.420.579 per bulan, hal ini menunjukkan penduduk yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin dan angka tersebut menunjukkan jumlah penduduk miskin masih tinggi.

Pada saat ini, tingkat kemiskinan di Kota Bandung mengalami penurunan, namun masih banyak masalah kesejahteraan sosial yang dapat menimbulkan kerugian berupa materi dan atau fisik. Kelompok penduduk miskin kota ditandai dengan banyaknya gelandangan, pengemis, pemulung, pedagang asongan dan lain sebagainya. Menurut Dinas Penanggulangan Kemiskinan dan Sosial Kota Bandung, bahwa masalah kesejahteraan sosial terbanyak di Kota Bandung pada tahun 2015 adalah keluarga fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, anak terlantar, keluarga berumah tidak layak huni, penyandang cacat, anak jalanan, pengemis dan lain sebagainya. Terjadinya masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dikarenakan orang-orang datang berpindah ke Kota Bandung tanpa dibekali dengan keterampilan, pendidikan yang memadai, dan informasi yang sempurna, sehingga kelompok ini tidak mampu bersaing secara formal maupun non formal. Dampaknya, untuk bertahan hidup maka kelompok ini melakukan berbagai aktivitas yang menimbulkan masalah kesejahteraan sosial yang menyebabkan kelompok ini berada dalam posisi tidak berdaya, rentan, dan terkucilkan dari masyarakat umumnya.

Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis :

1. apakah faktor-faktor kemiskinan, ketidakberdayaan, kerentanan, ketergantungan, dan keterasingan merupakan faktor penentu kemiskinan secara sosial di Kota Bandung,
2. Serta diantara faktor-faktor tersebut apakah terdapat faktor yang mendominasi dalam menentukan kemiskinan secara sosial di Kota Bandung.

B. Landasan Teori

Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan standar minimum (Kuncoro, 2006). Hal serupa di ungkapkan oleh Todaro (2006) bahwa kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Terdapat beberapa pengertian kemiskinan menurut para ahli diantaranya sebagai berikut :

1. Friedman mengemukakan bahwa kemiskinan dalam konteks politik dianggap sebagai suatu ketidaksamaan kesempatan dalam mengakumulasi basis

- kekuatan sosial (Suyanto, 2001).
2. Benyamin White mengemukakan bahwa kemiskinan adalah perbedaan kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat antara satu wilayah dengan wilayah lainnya (Dillon dan Hermanto, 1993).
 3. Bappenas menggambarkan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan kehidupan, kemiskinan dapat dikatakan ketika hak-hak dasar tersebut tidak dapat dipenuhi (Setiawan, 2010). Hak-hak yang harus terpenuhi diantaranya :
 - a. Terpenuhinya kebutuhan pangan.
 - b. Terpenuhinya kebutuhan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan, sumber daya alam dan lingkungan.
 - c. Merasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan.
 - d. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Kemiskinan sosial atau yang sering dikenal dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan atau kelompok-kelompok masyarakat karena struktur sosial. Kelompok tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi kelompok ini (Soemardjan, 1984). Kemiskinan sosial diartikan sebagai kondisi yang timbul karena sebaliknya, yaitu kondisi kecukupan atau kekayaan struktural yang dimiliki dan dinikmati oleh golongan masyarakat tertentu karena kedudukan dan peranannya yang mempengaruhinya untuk lebih mudah memanfaatkan sumber-sumber modal, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dalam masyarakat sehingga golongan ini tidak mengalami kemiskinan, namun membuat golongan lain jadi merasa miskin dan kekurangan (Soemardjan, 1984).

Kemiskinan (*Proper*), yaitu permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula pada kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok. Konsep ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, namun berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan. Kemiskinan ini meliputi kelompok masyarakat yang mengalami ketidakmampuan secara sosial maupun ekonomi seperti, keluarga fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi, dan warga masyarakat yang berdomisili di lingkungan kumuh (Chambers, 1988).

Ketidakberdayaan (*Powerless*), pada umumnya menjelaskan rendahnya kemampuan pendapatan yang berdampak pada kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Chambers, 1988). Terdapat beberapa hal ketidakberdayaan masyarakat miskin yaitu ketidakberdayaan dalam :

1. Memenuhi kebutuhan dasar, kelompok ini tidak memiliki kemampuan untuk mengakses kebutuhan dasar (makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan) dalam kehidupan sehari-hari.
2. Melakukan kegiatan usaha produktif, kelompok ini tidak memiliki kemampuan untuk mendirikan atau membuat suatu usaha sendiri dalam bentuk formal.
3. Menjangkau akses sumberdaya sosial dan ekonomi, kelompok ini tidak memiliki kekuatan sosial yang menyebabkan adanya ketidakmampuan mengakses sumberdaya sosial dan ekonomi.
4. Menentukan nasibnya sendiri, mendapatkan perlakuan diskriminatif, memiliki perasaan ketakutan, kecurigaan, dan sifat apatis serta fatalistik yang menyebabkan kelompok ini tidak memiliki kekuatan sosial dalam lingkungan sekitarnya.
5. Melepaskan diri dari budaya miskin, dan cenderung berharga diri rendah

sehingga sulit untuk keluar dari lingkaran setan kemiskinan.

Kerentanan menghadapi situasi darurat (*State of Emergency*), yaitu seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga dimana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan seperti bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Kondisi ini dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi yang mendesak saat ini (Chambers, 1988).

Ketergantungan (*Dependency*), yaitu keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain sangat tinggi. Kelompok ini tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber pendapatan. Kemiskinan dan ketergantungan merupakan suatu fenomena yang dapat menyebabkan penurunan sumber daya manusia yang pada akhirnya berdampak pada penurunan produktifitas pendapatan (Chambers, 1988).

Keterasingan (*Isolation*), yaitu faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan (Chambers, 1988).

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penduduk miskin Kota Bandung yang dijadikan sampel pada penelitian ini sebanyak 270 yang didapatkan melalui tabel Issac dan Michael. Penulis menggunakan pengukuran skala likert berbentuk kuesioner sebagai instrumen penelitian. Dalam penyusunan kuesioner menggunakan pernyataan yang memerlukan jawaban pada lima tingkatan yaitu, Sangat Setuju, Setuju, Cukup Setuju, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju. Skor ideal adalah skor yang dapat dicapai jika semua butir pernyataan dijawab dengan benar. Skor ideal diperoleh dengan cara menghitung rumus sebagai berikut :

Skor Minimal

: nilai skor terendah x jumlah responden

Skor

Maksimal

: nilai skor tertinggi x jumlah responden

Berdasarkan hasil dari pengolahan data diketahui bahwa terdapat faktor-faktor yang menentukan kemiskinan secara sosial di Kota Bandung yaitu, faktor kemiskinan, ketidakberdayaan, kerentanan, ketergantungan, dan keterasingan. Ke lima faktor tersebut memiliki beberapa indikator untuk menjelaskan masing-masing faktor. Faktor kemiskinan memiliki enam indikator, dimana indikator pertama yaitu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari disebabkan oleh ketidaksesuaian pembagian jumlah anggota keluarga yang ditanggung dengan perolehan pendapatan dalam tiap rumah tangga. Adapun beberapa kelompok miskin dapat memenuhi kebutuhan pangan

dengan cara berhutang ke warung sembako terdekat. Indikator ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sandang yang layak setiap hari ditandai dengan jenis pakaian yang digunakan untuk semua jenis kegiatan adalah sama, tidak ada pakaian ganti untuk melakukan aktivitas seperti, bekerja, sekolah, bermain, bepergian, dan lain sebagainya. Indikator ketidaklayakan tempat tinggal ditandai dengan kelompok miskin yang tidak memiliki tempat tinggal sehingga tidur di emperan toko, di gedung kosong, di pasar tradisional, serta mengontrak sepetak rumah yang mana segala macam aktivitas dilakukan diruangan yang sama seperti, tidur, belajar, makan, dan lain sebagainya. Indikator ketidakmampuan memenuhi pendidikan dasar ditandai dengan jumlah kelompok miskin yang menjadi sampel atau responden sebanyak 90 persen adalah tamatan SD. Indikator terakhir adalah kesulitan mengakses layanan kesehatan ditandai dengan kelompok miskin yang tidak mampu membeli obat di apotek dan tidak memiliki BPJS atau jaminan kesehatan lainnya.

Faktor ketidakberdayaan memiliki tujuh indikator. Indikator pertama yaitu kesulitan dalam mengakses pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak ditandai dengan kelompok miskin yang berprofesi sebagai pemulung, anak jalanan, lansia, dan PKL keliling. Dengan jenis pekerjaan tersebut sulit untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Indikator kesulitan mengakses pekerjaan, ketidakmampuan menentukan upah, dan kesulitan mendapatkan kesempatan kerja yang sama ditandai dengan keterbatasan pergaulan dan koneksi yang sempit, sehingga kelompok ini tidak mengalami peningkatan pekerjaan maupun pendapatan. Indikator kesulitan mengakses kegiatan sosial dan kesulitan mengakses layanan sosial ditandai dengan kelompok miskin yang memiliki waktu luang lebih sedikit dari kelompok lainnya menyebabkan keterbatasan interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Indikator terakhir yaitu kesulitan keluar dari pengaruh budaya miskin ditandai dengan budaya miskin yang diturunkan secara turun temurun membentuk sifat dan mental yang menerima saja kondisi miskin saat ini dibarengi dengan sifat kemalasan dan tidak mau merubah taraf hidup menjadi lebih baik.

Faktor kerentanan memiliki enam indikator, dimana indikator pertama yaitu kerentanan terkena penggusuran ditandai dengan kelompok miskin yang tidak memiliki kekuatan hukum dan memang melanggar ketertiban daerah sekitar, kelompok yang sering terkena aksi penggusuran ini adalah anak jalanan, pengemis, pengamen, gelandangan, pemulung, dan beberapa PKL keliling. Indikator kerentanan terkena kekerasan fisik ditandai dengan terjadinya aksi bentrok antar kelompok miskin seperti, anak jalanan, pengemis, pengamen, dan pemulung yang mempersoalkan daerah kekuasaannya. Indikator kerentanan terkena kekerasan verbal ditandai dengan kelompok miskin yang menghadapi cacian, makian, cemoohan, dan bentuk kekerasan verbal lainnya dari kelompok lain karena alasan perbedaan kasta. Indikator kerentanan terkena pelecehan secara fisik ditandai dengan kelompok miskin berjenis kelamin perempuan yang dilecehkan karena pakaian yang dikenakan maupun karena pergaulan bebas yang tidak dibatasi serta tidak adanya pengawasan dari pihak orang tua. Indikator kerentanan terkena tindakan kriminalitas ditandai dengan terjadinya pencurian barang berharga di lingkungan tempat tinggal kelompok miskin. Indikator terakhir yaitu kerentanan terkena perlakuan diskriminatif ditandai dengan kelompok miskin yang dengan sadar menjauhkan diri dari lingkungan sosial karena merasa memiliki keterbatasan dalam pengetahuan, modal, dan akses layanan sosial.

Faktor ketergantungan memiliki lima indikator. Indikator pertama yaitu keterbatasan dalam memperoleh pendapatan yang ditandai dengan ketidaksesuaian antara pendapatan yang didapatkan dengan jenis pekerjaan yang ditekuni karena

kelompok miskin harus memakan waktu yang jauh lebih lama untuk memperoleh pendapatan. Indikator ketergantungan terhadap bantuan pihak lain yang ditandai dengan pendapatan yang pas-pasan membuat kelompok miskin terjatuh dengan hutang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Indikator terakhir yaitu keterbatasan sifat kemandirian dalam diri ditandai dengan kelompok miskin yang enggan keluar dari zona nyaman saat ini, kelompok ini cenderung tidak ingin mengambil resiko sehingga enggan untuk bergaul dengan lingkungan baru.

Faktor keterasingan memiliki delapan indikator. Indikator kedekatan dengan lokasi kumuh dan padat penduduk yang ditandai dengan tempat tinggal kelompok miskin berada di gang pemukiman, di pinggir sungai, di pinggir rel kereta api, di atas trotoar dan lain sebagainya. Indikator sarana jalan yang tidak memadai ditandai dengan akses jalan yang berupa gang kecil dan kondisi jalan yang berlubang. Indikator sarana penerangan jalan yang tidak memadai ditandai dengan hanya tersedia penerangan dari rumah-rumah warga saja. Indikator keberadaan jauh dari akses kesehatan yang ditandai dengan jarak tempuh dari tempat tinggal kelompok miskin menuju akses kesehatan yang dilalui dengan berjalan kaki karena kelompok ini tidak mampu membayar biaya ongkos menuju akses kesehatan. Indikator keberadaan jauh dari akses pemerintah ditandai dengan rasa antisipasi dan menghindari aparat pemerintahan karena menghindari terjadinya penggusuran. Indikator terakhir adalah kesulitan membuka diri pada lingkungan ditandai dengan waktu yang dimiliki kelompok miskin sebagian besar digunakan untuk bekerja sehingga waktu luangnya hanya sedikit dan tidak sempat melakukan interaksi sosial dengan lingkungan sekitar.

Tabel 1 Hasil Survey Responden Penduduk Miskin Kota Bandung Terhadap Identifikasi Faktor-Faktor Yang Menentukan Kemiskinan Secara Sosial

Variabel	Rata-rata Skor	Keterangan
Kemiskinan	1.081	Sangat Setuju
Ketidakterdayaan	1.087	Sangat Setuju
Kerentanan	799	Cukup Setuju
Ketergantungan	1.116	Sangat Setuju
Keterasingan	900	Setuju

Sumber : Hasil Olah Data Primer

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa faktor dominan yang menentukan kemiskinan secara sosial adalah ketergantungan dengan rata-rata skor sebesar 1.116 yang berarti responden sangat setuju dengan ketergantungan yang dialami saat ini. Kondisi ini ditandai dengan kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa bantuan dari pihak lain, keterbatasan keahlian yang dimiliki, keterbatasan kepemilikan aset dan modal, dan keterbatasan pendapatan. Hal tersebut terjadi karena responden memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Faktor kedua adalah ketidakberdayaan yang memiliki rata-rata skor sebesar 1.087 yang berarti responden sangat setuju dengan ketidakberdayaan yang dialami saat ini. Ditandai dengan ketidakberdayaan dalam menentukan tarif upah, ketidakberdayaan dalam mengakses informasi pekerjaan, dan ketidakberdayaan memiliki kesempatan kerja yang sama dengan orang lain. Faktor yang ketiga adalah kemiskinan yang memiliki rata-rata skor sebesar 1.081 yang berarti responden sangat setuju dengan kondisi kemiskinan yang dialami saat ini. Ditandai dengan ketidakmampuan memiliki tempat tinggal, ketidakmampuan memenuhi pendidikan dasar, dan ketidaklayakan pekerjaan yang ditekuni. Faktor keempat adalah keterasingan dengan rata-rata skor sebesar 900 yang ditandai dengan lokasi tempat tinggal di kawasan kumuh dan padat penduduk, dan jauh

dari sarana publik. Namun untuk variabel kerentanan memiliki skor terkecil yaitu sebesar 799 yang menunjukkan bahwa variabel ini hanya memberikan sedikit peran dalam menentukan kemiskinan secara sosial di Kota Bandung.

D. Kesimpulan

Kemiskinan sosial yang terjadi di Kota Bandung tidak lain dikarenakan penduduk miskin Kota Bandung memiliki pendidikan yang rendah, tidak dapat mengembangkan diri secara mandiri dan tidak memiliki koneksi pada lingkungan luar sehingga membuat penduduk miskin sulit keluar dari lingkaran setan kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan secara sosial ditentukan oleh faktor kemiskinan itu sendiri, faktor ketidakberdayaan, faktor ketergantungan, faktor kerentanan, dan faktor keterasingan. Faktor yang dominan dalam menentukan kemiskinan secara sosial di Kota Bandung adalah faktor ketergantungan yang ditandai dengan kondisi kelompok miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa bantuan dari pihak lain, keterbatasan keahlian yang dimiliki, keterbatasan kepemilikan aset dan modal, dan keterbatasan pendapatan. Kondisi tersebut dilatarbelakangi oleh pendidikan yang rendah dan keterbatasan akses pekerjaan.

E. Saran

Pemerintah diharapkan melakukan kajian ulang, melakukan evaluasi, dan melakukan pengawasan terhadap segala macam bentuk program pengentasan kemiskinan agar realisasi program-program tersebut tepat sasaran dan efektif. Program-program tersebut diantaranya program keluarga berencana, program wajib belajar 9-12 tahun, program BPJS, dan program usaha jangka panjang.

Daftar Pustaka

- Amaliah, Tasya Aspiranti dan Ima. 2016.** Kemiskinan Dari Perspektif Faktor Sosial : Suatu Studi Kabupaten Garut. 2016.
- BPS. 2017.** Data Publikasi Statistik. Kota Bandung : Badan Pusat Statistik, 2017.
- . **2017.** Kota Bandung Dalam Angka. Kota Bandung : Badan Pusat Statistik, 2017.
- Chambers, Robert. 1983.** Rural Development, Putting The Last First. London : Longman, 1983.
- Dinas Penanggulangan Kemiskinan dan Sosial. 2017.** Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kota Bandung. Kota Bandung : Dinas Penanggulangan Kemiskinan Sosial Kota Bandung, 2017.
- Hermanto, H.S Dillon dan. 1993.** Kemiskinan Di Negara Berkembang, Masalah Konseptual dan Global. Jakarta : Prisma LP3ES, 1993.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006.** Ekonomi Pembangunan. Jakarta : Salemba Empat, 2006.
- Setiawan, B. 2010.** Konsep dan Analisis Isue Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pesisir. Jakarta : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2010.
- Soemardjan, Selo. 1984.** Kemiskinan Struktural. Jakarta : YISS, 1984.
- Suryawati. 2005.** Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. 2005.
- Suyanto, Bagong. 2001.** Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin. s.l. : FISIP Unair, 2001.
- Todaro, Michael P. Smith. 2006.** Pembangunan Ekonomi Edisi Ke-9. Jakarta : Erlangga, 2006.